BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mankiw (2003):

Because high inflation imposes various costs on society, keeping inflation at a low level is a goal of economic policymakers around the world.

Fakta bahwa inflasi pada dasawarsa 1960-an pernah mencapai lebih dari 635% merupakan pengalaman pahit bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah berusaha untuk mengendalikan laju inflasi (dan variabel-variabel ekonomi makro lainnya) melalui strategi pembangunan jangka panjang terarah dan terencana yang dimulai tahun 1969. Hasilnya pada tahun 1969–1971 inflasi berada pada level di bawah 10%. Kemudian tahun 1972 sampai dengan 1980-an laju inflasi rata-rata berada pada level dua digit, dan pada tahun 1984 sampai 1996 laju inflasi dapat dikendalikan pada level satu digit. Sayangnya, krisis moneter pada pertengahan 1997 membuat laju inflasi kembali melejit sehingga tahun 1998 inflasi mencapai 77,63%.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Selama dekade 1970-an dan 1980-an, proses pembangunan mengalami banyak hambatan yang terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah internasional pada dasawarsa 1980-an dan adanya resesi ekonomi dunia. Di tengah berbagai hambatan internal maupun eksternal, Indonesia tetap mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang impresif. Setelah hampir 30 tahun (1969–1997) Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut, sayangnya pada tahun 1998 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13,13% akibat dari krisis moneter 1997.

Pascakrisis moneter, perekonomian Indonesia mulai mengalami perbaikan, sehingga antara tahun 1998 dan 2009 laju inflasi kembali dapat dikendalikan oleh pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan. Secara kontras, terdapat suatu perbedaan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada periode sebelum dan sesudah krisis moneter 1997. Pada periode sebelum krisis, antara tahun 1969 dan

1997, inflasi walaupun masih bertahan sekitar 11,50% per tahun, tetapi telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata 6,62% setahun). Setelah krisis, antara tahun 1999 dan 2009, walaupun inflasi berhasil diturunkan menjadi rata-rata 8,15% setahun, tapi ternyata pertumbuhan ekonomi hanya 4,66% setahun. Perbedaan ini diduga akibat perbedaan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah antara tahun 1969–1997 dan tahun 1998–2009, terutama yang terkait erat dengan usaha memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pada saat bersamaan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah.

Tidak mengherankan jika karakter hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak pernah berhenti diperdebatkan. Seperti yang ditulis oleh BI (2009), pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dalam mengambil keputusan melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

1.2 Inflasi di Indonesia dan Variabel-variabel yang Mempengaruhinya Tahun 1969-2009

Dornbusch & Fischer (1993) menggolongkan tingkat inflasi rata-rata di Indonesia dekade 1970-an dan 1980-an dalam rentang moderat (15% s.d. 30%). Padahal sebelum itu (1960-an) inflasi berada di ambang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang dekade 1960-an, inflasi rata-rata sebesar 196,08% dengan tingkat paling parah terjadi tahun 1966 (635,35%). Hanya pada tahun 1969 saja inflasi berada pada level rendah (9,89%).

Universitas Indonesia

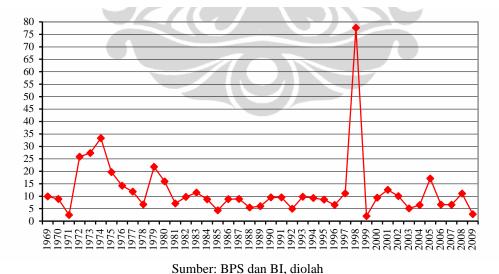
¹ Perhitungan rata-rata setelah krisis moneter tanpa memasukkan tingkat inflasi tahun 1998 (77,63%) maupun pertumbuhan ekonomi tahun 1998 (-13,13%).

Kemudian, pergantian pemerintahan mampu membawa Indonesia kembali menjadi negara dengan tingkat inflasi antara rendah dan moderat sampai dengan tahun 1997. Tetapi Indonesia lagi-lagi mengalami ketidakberuntungan dan kembali mengalami keterpurukan inflasi di tahun 1998 yang akibatnya berdampak sangat luas dengan timbulnya beragam tragedi sosial, politik, dan ekonomi yang hampir merata di seluruh penjuru tanah air. Untuk melihat fenomena fluktuasi tingkat inflasi Indonesia selama empat dekade terakhir, termasuk "tragedi inflasi 1998" berikut disajikan dalam Tabel 1.1 dan Grafik 1.1.

Tabel 1.1 Tingkat Inflasi (%) Berdasarkan IHK 1969-2009

Thn	Inflasi	Thn	Inflasi	Thn	Inflasi	Thn	Inflasi
1969	9,89						
1970	8,88	1980	15,97	1990	9,53	2000	9,40
1971	2,47	1981	7,09	1991	9,52	2001	12,55
1972	25,84	1982	9,69	1992	4,94	2002	10,03
1973	23,30	1983	11,46	1993	9,77	2003	5,16
1974	33,32	1984	8,76	1994	9,24	2004	6,40
1975	19,69	1985	4,31	1995	8,60	2005	17,11
1976	14,20	1986	8,83	1996	6,50	2006	6,60
1977	11,82	1987	8,90	1997	11,10	2007	6,59
1978	6,69	1988	5,47	1998	77,60	2008	11,06
1979	21,77	1989	5,97	1999	2,00	2009	2,78

Sumber: BPS dan BI, diolah



Grafik 1.1 Tingkat Inflasi (%) Berdasarkan IHK 1969-2009

Dari Tabel 1.1 dan Grafik 1.1 bisa disimak inflasi dekade 1970-an lebih fluktuatif dibandingkan dekade-dekade sesudah itu. Dekade 1970-an diawali

dengan inflasi satu digit (8,88%) yang bahkan menurun di tahun 1971 (2,47%). Setelah itu, selama tiga tahun berturut-turut (1972, 1973, 1974) inflasi justru melesat naik dengan cepat (25,87%; 27,30%; 33,32%), tapi kemudian secara perlahan turun lagi hingga angka 6,69% di tahun 1978. Pada tahun berikutnya (1979), inflasi melonjak pesat lebih dari 3 kali lipat 21,77%; kemudian hanya dalam waktu dua tahun inflasi kembali turun drastis ke angka 7,09% di tahun 1981. Antara 1981 dan 1997 inflasi relatif stabil dengan rataan 8,22%; dimana pada kurun waktu 1981–1997 ini inflasi tertinggi terjadi tahun 1983 (11,46%) dan terendah pada tahun 1985 (4,31%). Setelah periode yang relatif stabil selama 17 tahun ini, inflasi meningkat sangat tajam dan masuk kategori *hyper inflation* di tahun 1998 hingga mencapai 77,6% dan kemudian pada akhirnya mengakibatkan kerusuhan sosial serta gejolak politik yang ditandai dengan runtuhnya rejim orde baru. Sepuluh tahun terakhir ini, tahun 1999 hingga 2009, tingkat inflasi cukup fluktuatif dengan besaran rata-rata 8,69% dimana tingkat paling rendah adalah sebesar 2,00% (1999) dan paling tinggi 17,11% (2005).

Fenomena inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, dan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Studi keterkaitan inflasi dan pertumbuhan ekonomi banyak menghasilkan temuan bahwa antara keduanya bisa berhubungan negatif atau bisa juga tidak ada korelasi yang signifikan. Bukti statistik di negaranegara berkembang Afrika dan Amerika Latin mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDB berdampak negatif terhadap inflasi (Ericsson, Irons & Tryon, 2001). Bukti lain di Fiji, pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi laju inflasi walau dalam derajat yang tidak terlalu signifikan (Gokal & Hanif, 2004).

Kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah adalah variabel lain yang memicu pergerakan inflasi. Sejumlah studi mencatat temuan-temuan mengejutkan dan menarik tentang interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter, khususnya ketika otoritas moneter menargetkan inflasi (Andersen, 2005). Menurut Andersen (2005), kebijakan fiskal disebut ekspansif apabila mampu secara langsung (temporer) mempengaruhi proses inflasi dengan cara mempengaruhi output nasional dan kemudian mereduksi inflasi; apabila efek yang ditimbulkannya berlawanan (meningkatkan inflasi) disebut kontraktif.

Sementara itu, seperti juga kebanyakan ekonom lainnya, Mankiw (2003) percaya bahwa pada hampir semua kasus inflasi, penyebab utamanya adalah pertumbuhan uang. Contohnya di Indonesia, hanya dalam waktu 9 bulan saat krisis 1997 melanda, pertumbuhan uang beredar melesat hingga 115% (Siregar & Rajaguru, 2005) dan menjadi penyebab utama meningkatnya inflasi tahun 1998 yang mencapai 76,6%. Hasil studi Siregar & Rajaguru (2005) mendukung aliran monetaris seperti Harriss (1975) dan Moroney (2002) bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, inflasi adalah fenomena moneter akibat dari pertumbuhan uang.

Faktor lain yang mempengaruhi inflasi adalah harga minyak. Studi Cologni & Manera (2008) menemukan adanya hubungan jangka-pendek maupun jangka-panjang antara variabel-variabel ekonomi makro, yaitu output, permintaan uang, harga minyak, inflasi, nilai tukar, dan tingkat bunga. Oleh karenanya di Indonesia, dimana inflasi sering juga dikategorikan sebagai *cost push inflation*, goncangan harga minyak disinyalir sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya inflasi karena bisa saja kenaikan harga minyak tersebut disalurkan ke harga produk yang dihasilkan (Surjadi, 2006). Bagi negara pengekspor neto (ekspor minyaknya lebih besar daripada impor minyaknya), kenaikan harga langsung menaikkan pendapatan nasional riil melalui pendapatan ekspor yang lebih besar. Namun sangat tidak beruntung, sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi importir neto minyak (Surjadi, 2006).

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997/98 juga diyakini dipicu oleh volatilitas nilai tukar. Saat itu kurs rupiah terdepresiasi hingga sebesar 95,1% di tahun 1997 dan 72,6% di tahun 1998. *Nominal shock* ini mengakibatkan pengaruh yang sangat besar pada sektor riil yang berujung pada kenaikan harga. Studi yang dilakukan oleh Levy-Yeyati & Sturzenegger (2003) menunjukkan bahwa di negara berkembang semakin tidak fleksibel sistem nilai tukarnya, semakin rendah pula tingkat pertumbuhan ekonominya. Hasil studi tersebut juga secara signifikan menggarisbawahi Indonesia, dimana volatilitas nilai tukar di Indonesia berpengaruh terhadap harga antara lain melalui jalur ekspor dan impor.

Hubungan tingkat inflasi dan tingkat perubahan variabel-variabel yang mempengaruhinya seperti yang disebutkan di atas bisa ditelaah pada Tabel 1.2.

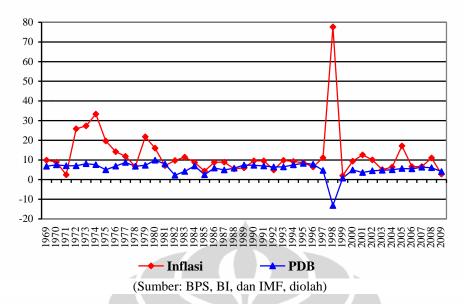
Sementara itu, untuk melihat hubungan-hubungan tersebut secara lebih jelas, bisa disimak pada Grafik 1.2 s.d. Grafik 1.5.

 $\begin{array}{c} \textbf{Tabel 1.2}\\ \textbf{Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan PDB, PeP, JUB, NTN, dan BBM}\\ \textbf{1969-2009 (dalam \%)}^2 \end{array}$

Thn	Inflasi	PDB	PeP	JUB	NTN	BBM
1969	9,89	6,82	26,92	61,02	0,00	9,12
1970	8,88	7,55	47,61	36,48	15,95	6,27
1971	2,47	7,02	16,38	28,17	9,79	0,00
1972	25,84	7,04	21,41	47,94	0,00	0,00
1973	23,30	8,10	72,95	40,96	0,00	21,07
1974	33,32	7,63	17,46	40,14	0,00	158,93
1975	19,69	4,98	49,07	33,34	0,00	0,00
1976	14,20	6,89	26,86	28,23	0,00	24,55
1977	11,82	8,76	30,61	25,17	0,00	6,83
1978	6,69	6,77	28,00	24,02	50,60	0,00
1979	21,77	7,32	40,41	36,03	0,32	118,86
1980	15,97	9,88	25,57	47,56	-0,04	13,85
1981	7,09	7,93	37,62	29,85	2,75	A -5,41
1982	9,69	2,25	12,04	9,79	7,53	-9,37
1983	11,46	4,19	11,74	6,29	43,54	-7,82
1984	8,76	6,98	12,93	13,37	8,05	-13,03
1985	4,31	2,46	21,33	17,75	4,75	7,07
1986	8,83	5,87	9,94	15,57	45,87	-40,96
1987	8,90	4,93	-0,34	8,63	0,55	7,25
1988	5,47	5,78	10,68	13,46	4,91	-5,66
1989	5,97	7,46	25,71	39,76	3,81	29,64
1990	9,53	7,24	12,33	18,42	5,79	29,63
1991	9,52	6,95	20,46	10,59	4,79	-28,61
1992	4,94	6,46	17,74	9,25	3,51	-0,56
1993	9,77	6,50	10,71	27,89	2,33	-25,23
1994	9,24	7,54	4,22	23,28	4,27	18,26
1995	8,60	8,22	14,74	16,10	4,91	10,96
1996	6,50	7,82	13,25	21,66	3,25	33,35
1997	11,10	4,70	6,58	22,24	95,13	-27,85
1998	77,60	-13,13	26,69	29,17	72,58	-38,43
1999	2,00	0,79	33,47	23,16	-11,71	131,21
2000	9,40	4,92	24,99	30,13	35,43	9,13
2001	12,55	3,64	24,94	9,58	8,39	-32,08
2002	10,03	4,50	16,58	7,99	-14,04	52,20
2003	5,16	4,78	23,81	16,60	-5,31	9,28
2004	6,40	5,03	16,71	13,41	9,75	34,77
2005	17,11	5,69	17,76	11,07	5,81	37,16
2006	6,60	5,50	28,05	28,08	-8,24	4,37
2007	6,59	6,28	14,47	27,63	4,42	47,88
2008	11,06	6,06	26,42	1,20	16,25	-55,28
2009	2,78	4,10	27,96	8,41	-14,16	81,13

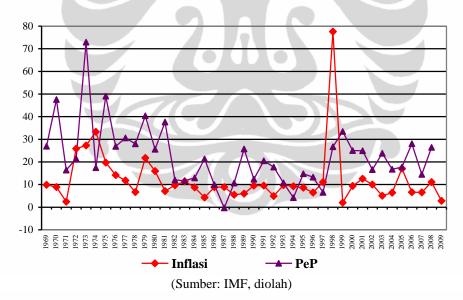
Sumber: BPS, BI, IMF, diolah

² PDB (Produk Domestik Bruto) nominal, PeP (pengeluaran pemerintah), JUB (Jumlah Uang Beredar dalam arti sempit, M1), NTN (Nilai Tukar Nominal: kurs Rupiah per USD), dan BBM (harga minyak internasional).



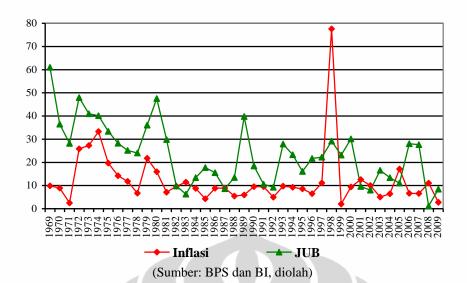
Grafik 1.2 Tingkat Inflasi (%) dan Pertumbuhan PDB y-o-y (%) 1969-2009

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa trend pertumbuhan ekonomi tahun 1969–2009 tampaknya berdampak negatif terhadap inflasi (PDB naik, inflasi turun).



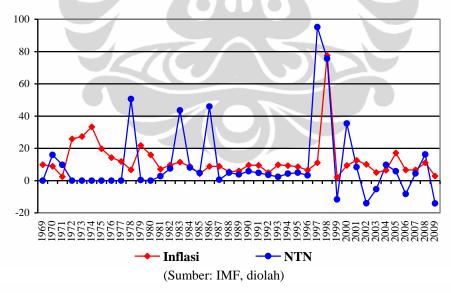
Grafik 1.3 Tingkat Inflasi (%) dan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah (%) 1969-2009

Pengeluaran pemerintah saat sebelum krisis tampak selalu meningkat cukup besar dari tahun ke tahun. Setelah krisis, pengeluaran pemerintah juga selalu naik meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih kecil. Dari Grafik 1.3 di atas, trend yang terlihat (walaupun tidak begitu jelas) adalah kenaikan pengeluaran pemerintah cenderung menurunkan inflasi. Namun pada periode setelah krisis trend ini terlihat sedikit lebih jelas.



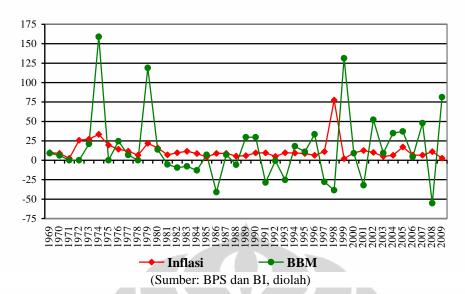
Grafik 1.4 Tingkat Inflasi (%) dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar JUB (%) 1969-2009

Teori kuantitas uang beredar tampaknya sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Seperti yang dapat dilihat pada Grafik 1.4 di atas, trend rata-rata pertumbuhan JUB Indonesia bergerak selaras dengan fluktuasi inflasi (JUB tumbuh, inflasi naik).



Grafik 1.5 Tingkat Inflasi (%) dan Pertumbuhan Nilai Tukar Nominal NTN (%) 1969-2009

Secara keseluruhan hubungan antara perubahan nilai tukar dan tingkat inflasi sebelum dan sesudah tahun 1997 tampaknya mengalami pergeseran. Pada Grafik 1.5 bisa dilihat setelah krisis moneter 1997, nilai tukar bergerak lebih fluktuatif, dengan trend yang tampaknya berhubungan negatif dengan inflasi.



Grafik 1.6 Tingkat Inflasi (%) dan Pertumbuhan Harga Minyak BBM (%) 1969-2009

Pada Grafik 1.6 di atas, trend rata-rata pertumbuhan harga minyak tampaknya tidak bergerak selaras dengan fluktuasi inflasi di Indonesia pada periode sebelum krisis (1969 s.d. 1997). Tetapi pada periode setelah krisis moneter (1999-2009), perubahan harga minyak sepertinya bergerak searah dengan inflasi, yaitu harga minyak naik, maka inflasi naik. Kendati demikian, perlu dibuktikan secara empiris.

1.3 Perumusan Masalah

Mengingat dampak inflasi yang begitu luas dalam kehidupan sosial dan politik maupun perekonomian Indonesia yang secara langsung bisa memicu kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara sampai titik buruk tertentu, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan penyebab inflasi pada masa prakrisis dan pascakrisis moneter. Untuk itu, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini dalam 2 pertanyaan penelitian: (1) Berapa besar dan apa perbedaan antara pengaruh jumlah uang beredar, PDB nominal, pengeluaran pemerintah, nilai tukar riil, harga minyak, dan inflasi itu sendiri terhadap proses inflasi di Indonesia sebelum dan sesudah krisis moneter 1997? (2) Apa implikasi faktor-faktor penyebab inflasi tersebut terhadap kebijakan ekonomi makro yang terkait inflasi Indonesia di masa mendatang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka secara umum penelitian tesis ini bertujuan mendapatkan bukti empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, terutama faktor dengan tingkat pengaruh terbesar terhadap inflasi, pada masa sebelum dan setelah krisis moneter 1997. Selain itu, secara khusus penulis akan mendiskusikan keterkaitan antara faktor-faktor tersebut dengan implikasi kebijakan ekonomi makro Indonesia di masa yang akan datang.

Ada dua manfaat utama yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Pertama, hasil penelitian ini baik untuk penulis maupun pihak-pihak lain diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi atau sebagai pembanding bagi penelitian selanjutnya, terutama yang terkait erat dengan proses inflasi dan faktor-faktor penyebabnya di Indonesia. Kedua, bagi pemerintah, hasil yang diperoleh mungkin bisa dipakai sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien yang terkait dengan laju inflasi dan determinannya.

1.5 Batasan Penelitian

Pemilihan tahun dan periode penelitian (1969Q1-1997Q4 dan 1999Q1-2009Q4) didasari atas tiga pertimbangan: (1) Inflasi Indonesia mulai stabil sejak 1969; (2) Strategi pembangunan jangka panjang mulai dicanangkan secara terarah dan terencana sejak 1969; dan (3) Terjadi krisis moneter 1997 yang telah merubah arah kebijakan perekonomian makro Indonesia. Perlu dicatat bahwa tahun 1998 tidak dimasukkan sebagai periode penelitian dalam studi ini mengingat variabelvariabel penelitian tahun 1998 berada pada tingkat yang tidak normal, sehingga dikhawatirkan hasilnya akan menjadi bias.

Dari sisi kedalaman pengolahan, analisis, dan interpretasi data, penulis lebih meletakkan fokus pada faktor-faktor penyebab inflasi yang dipilih untuk studi ini serta derajat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses terjadinya inflasi, serta melakukan perbandingan pengaruh-pengaruh tersebut pada era sebelum dan setelah krisis. Kemudian penulis mencoba menyimpulkan hasilnya untuk

selanjutnya memberikan saran kebijakan yang bisa diterapkan di masa mendatang.

1.6 Metodologi Penelitian

Rancangan modelnya—rincian yang lebih lengkap akan dibahas pada Bab III (Metodologi Penelitian)—adalah bahwa inflasi merupakan fungsi dari perubahan jumlah uang beredar (M1), pertumbuhan PDB nominal, perubahan nilai tukar riil, dan perubahan harga minyak, maupun perubahan inflasi itu sendiri. Model yang dirancang adalah sebuah model VAR dimana semua variabel-variabelnya bersifat endogen.

Data sekunder yang dipakai dalam studi ini adalah data kwartalan deretwaktu (time-series) periode 1969Q1-2009Q4 dari berbagai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) serta International Monetary Fund (IMF), baik berupa data cetak maupun data elektronik, sesuai dengan semua variabel yang ada dalam persamaan. Perlu dicatat bahwa data tahun 2008 merupakan data sementara, sedangkan tahun 2009 masih merupakan data sangat sementara. Program pengolahan data yang digunakan adalah EViews version 4.1. Hasil pengolahan data akan diinterpretasikan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, dan kemudian akan dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sejenis untuk menarik kesimpulan dan saran maupun implikasi kebijakan di masa mendatang. Data dan model dalam studi ini akan diuji validitasnya agar bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak bias. Beberapa uji yang akan dilakukan antara lain: uji akar unit, uji Augmented Dickey-Fuller (ADF), uji Phillips-Perron (PP), uji Impulse Response Function dan Variance Decomposition. Pemaparan yang lebih menyeluruh akan disajikan pada Bab III, Metodologi Penelitian.

1.7 Hipotesa Penelitian

Hipotesis yang diajukan untuk menjelaskan penelitian tesis ini adalah, "Ada perbedaan antara pengaruh PDB, pengeluaran pemerintah, uang beredar, nilai tukar dan harga minyak maupun inflasi itu sendiri terhadap proses inflasi sebelum dan sesudah krisis moneter 1997". Secara rinci definisi operasional masing-

masing variabel dan pengujian hipotesis akan diuraikan dalam Bab III, Metodologi Penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tesis ini ditulis ke dalam lima bab. Bab I, Pendahuluan, berisi latar belakang masalah (termasuk deskripsi inflasi Indonesia 1969-2009), perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metodlogi penelitian, hipotesa penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, Tinjauan Literatur, memuat tinjauan teori secara umum, faktor-faktor penyebab inflasi, tinjauan literatur hasilhasil studi dan model-model inflasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta kerangka berpikir pemecahan masalah. Bab III, Metodologi Penelitian, merupakan bagian yang menggambarkan persamaan-persamaan yang dipakai untuk membangun spesifikasi model, definisi operasional variabel yang ada dalam model, hipotesa penelitian, sampel dan sumber serta koleksi data. Bab IV, Hasil dan Pembahasan, berisi analisis dan interpretasi dari hasil-hasil analisis masing-masing variabel secara parsial ataupun serentak, analisis dan uji statistik, uji hipotesis, serta analisis secara ekonometrik dan ekonomi. Terakhir adalah Bab V, Kesimpulan dan Rekomendasi, yang akan memaparkan hasil penelitian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan implikasi maupun rekomendasi kebijakan.